

ANALISIS EFEKTIVITAS REALISASI BELANJA DAERAH PADA KOTA BEKASI PERIODE 2018 – 2022

Yunita Irsas¹, Sri Mulyani²

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email : yunita20003@mail.unpad.ac.id¹, s.mulyani@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas realisasi belanja daerah di Kota Bekasi dan mengetahui belanja daerah apa saja yang tidak mencapai target serta faktor penyebab dari belanja daerah yang tidak mencapai target. Objek penelitian ini adalah efektivitas realisasi belanja daerah Kota Bekasi pada periode 2018-2022 yang datanya diolah dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi periode 2018-2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, analisis dokumen, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan capaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi pada periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan capaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi dari 61,29% menjadi sebesar 75%, dan pada tahun 2019-2020, pada tahun 2020-2021, dan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan capaian kinerja Pemerintah Kota. Capaian kinerja tertinggi pada tahun 2019 sebesar 75% dan penurunan terus-menerus hingga mencapai 42,41% pada tahun 2022. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi terhadap program pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa efektivitas dan keberhasilan program harus diukur tidak hanya dari pencapaian output, tetapi juga dari dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun berbagai kendala seperti birokrasi, keterlambatan pencairan dana, dan kurangnya kompetensi SDM ditemukan, Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelompok belanja tertentu, seperti belanja modal tanah, belanja subsidi, dan belanja hibah, sering kali tergolong tidak efektif atau kurang efektif selama periode penelitian. Faktor-faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan belanja daerah meliputi perencanaan yang kurang matang, birokrasi yang rumit, dan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah. Upaya perbaikan melalui evaluasi berkala, peningkatan manajemen proyek, dan penyesuaian strategi diharapkan dapat memperbaiki

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

kinerja belanja daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Efektivitas Realisasi Belanja Daerah, Capaian Kinerja

ABSTRACT

This research was carried out at the Bekasi City Government. This research aims to analyze the effectiveness of the realization of regional spending in Bekasi City and find out what regional spending does not reach the target as well as the factors that cause regional spending not reaching the target. The object of this research is the effectiveness of the realization of Bekasi City regional expenditure in the 2018-2022 period, the data of which was processed from the Bekasi City Government Agency Performance Report for the 2018-2022 period. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research are interviews, document analysis, and literature study. The results of the research show that the performance achievements of the Bekasi City Government in the 2018-2022 period experienced winter. In 2018-2019 there was an increase in the performance achievements of the Bekasi City Government from 61.29% to 75%, and in 2019-2020, in 2020-2021, and in 2021-2022 there was a decrease in the City Government's performance achievements. The highest performance achievement in 2019 was 75% and continued to decline until it reached 42.41% in 2022. This ineffectiveness was caused by failure to achieve the performance indicator targets that had been set. In evaluating the program, the Bekasi City government emphasized that the effectiveness and success of the program must be measured not only by the achievement of output, but also by the real impact on community welfare. Despite various obstacles such as bureaucracy, delays in disbursement of funds, and lack of competency of existing human resources, the Bekasi City Government continues to make efforts to improve coordination, transparency, and community participation. This research also shows that certain groups of expenditures, such as land capital expenditures, subsidy expenditures and grant expenditures, were often classified as ineffective or less effective during the research period. The main factors that cause ineffective regional spending include inadequate planning, complicated bureaucracy, and lack of coordination between regional apparatus. Improvement efforts through regular evaluations, improved project management and adjustment strategies are expected to improve regional spending performance and support the achievement of sustainable development goals.

Keywords : Effectiveness of Regional Expenditure Realization, Performance Achievement

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk membangun daerah yaitu dengan mempersiapkan anggaran sesuai dengan yang direncanakan di awal sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah. Keefektifan merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu (Mardiasmo, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Proses ini mencakup perencanaan, eksekusi, anggaran, pelaporan keuangan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah serta menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk menjamin pemerintahan yang baik, laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat mencapai good governance (Amelia, 2022).

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang memiliki potensi daerah dengan industri yang maju guna mendorong proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak diterapkan otonomi daerah pada tahun 2001 setiap pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melakukan pemberdayaan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut sehingga daerah mampu menunjang kelancaran dan keberlangsungan proses pembangunan dalam jangka panjang dan juga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Kosmas,2022). Kota Bekasi mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang baik. Analisis ini diperuntukkan untuk menilai apakah kegiatan belanja daerah sudah terlaksana dengan efektif, kelompok belanja daerah apa saja yang dinilai kurang efektif, serta penyebab dari ketidakefektifan belanja daerah. Sebagai contoh perbandingan anggaran belanja dan realisasi belanja daerah dari tahun 2018-2022 sebagai berikut ini:

**Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bekasi
Tahun 2018-2022 (Ribuan Rupiah)**

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Persentase (%)
2018	Rp5.745.961.495.721	Rp5.000.442.687.914,14	87,03%
2019	Rp7.004.094.885.460	Rp5.556.376.729.279,03	79,47%
2020	Rp5.757.432.487.561	Rp4.785.811.812.190	83,12%
2021	Rp6.449.614.890.862	Rp5.704.885.462.982	88,45%
2022	Rp6.673.930.904.273	Rp5.718.816.481.557	85,69%

Sumber : Realisasi APBD

<https://bpkad.bekasikota.go.id/pages/laporan-realisisi-anggaran-lra>

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2019 jumlah anggaran belanja Pemerintah Kota Bekasi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 dimana jumlah anggaran belanja daerah tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah anggaran belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp5.757.432.487.561 dan pada tahun 2019 sebesar Rp7.004.094.885.460. Penurunan alokasi anggaran tersebut terjadi karena dipindahkannya dana untuk menangani dan mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19 sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya penurunan tersebut dapat memicu pencapaian pembangunan yang ada di Kota Bekasi karena pengalihan fokus untuk Pandemic Covid-19.

Grafik 1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber: Diolah dari LKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi periode 2018-2022 menunjukkan dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat beberapa indikator kinerja tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dengan adanya fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kota Bekasi yaitu tidak tercapainya program kerja yang ditetapkan, Kota Bekasi terus melakukan perbaikan-perbaikan atas program-program kerja yang ditetapkan yang belum mencapai target. Program kerja yang tidak mencapai target salah satunya dikarenakan adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi anggaran, masa Pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga pelaksanaan kegiatan masih banyak dilakukan secara online baik koordinasi maupun pengiriman data jadi kegiatan belum dilaksanakan dengan secara normal. Oleh karena itu, analisis belanja daerah sangat penting untuk menganalisis pengeluaran pemerintah daerah guna menilai apakah APBD kota bekasi telah digunakan secara efisien tanpa mengalokasikan dana untuk kegiatan yang tidak esensial dan menghindari pengeluaran yang tidak terencana.

Penelitian terdahulu mengenai analisis tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2018-2022 yang dilakukan oleh Ami (2023) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dari tahun 2018-2019 bervariasi. Pada tahun 2018,2019,2021,dan 2022 dinyatakan efektif, kemudian pada tahun 2020 dikategorikan ke dalam cukup efektif. Pada tahun 2020 dinilai cukup efektif dikarenakan adanya faktor dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan program-program yang disusun tidak berjalan dengan semestinya Selama tahun

2018 hingga 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berhasil melaksanakan anggaran belanjanya secara cukup efisien. Ini terjadi karena manajemen anggaran belanja belum berhasil memenuhi standar efisiensi, yaitu penggunaan dana yang minimal untuk mencapai hasil yang optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Stewardship theory menjelaskan situasi di mana para manajer lebih mengutamakan pencapaian tujuan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Dalam konteks akuntansi organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya, *stewardship theory* dapat diterapkan. Pada organisasi ini, para manajer atau pejabat publik diharapkan bertindak sebagai *steward* (pengemban amanah) yang mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat yang dilayani dibandingkan kepentingan pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *theory stewardship* akan berfungsi untuk menjelaskan bagaimana pengelola anggaran diharapkan dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan kepentingan *principal* atau masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan bagi pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Penyusunan APBD dilakukan secara bersama-sama dan disetujui oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD berfungsi sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kerjanya selama satu tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan pendapatan yang dimiliki (Bastian, 2022). Dengan demikian, APBD menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, mencakup seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah didefinisikan sebagai seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. belanja daerah adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut dalam periode satu tahun anggaran. Dana yang dikeluarkan ini sifatnya tidak akan diterima kembali atau tidak menghasilkan penerimaan di kemudian hari. Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai berbagai pos pengeluaran seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga lainnya yang bersifat tidak menghasilkan penerimaan secara langsung (Yuwono, 2005). Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengeluaran daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bertanggung jawab yang memenuhi tugasnya sebagai penyedia layanan publik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip desentralisasi adalah bagian penting dari manajemen administrasi di era otonomi daerah (Patarai, 2018). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kesuksesan otonomi daerah sendiri tidak terlepas dari peran pemerintahan dalam mengelola keuangannya. Melalui pengelolaan keuangan daerah tersebut pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerahnya untuk membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa uang atau dana publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pengukuran Kinerja Daerah

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Dalam organisasi sektor publik, tingkat keberhasilan biasanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Ketika sektor publik dapat memberikan pelayanan yang baik, berkualitas tinggi, dan terjangkau kepada masyarakat, maka tingkat keberhasilannya akan diakui. Dengan kata lain, pengukuran kinerja pada sektor publik menunjukkan sejauh mana organisasi tersebut dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran nyata dari upaya mewujudkan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Kinerja mencerminkan sejauh mana sasaran dan tujuan dari instansi pemerintah dapat dicapai. Dengan melakukan pengukuran kinerja, organisasi dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian kinerja dan hasil yang diperoleh dari program/kegiatan yang dijalankan. Informasi ini sangat penting untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar kinerja organisasi dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan (Weny Putri, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengukuran kinerja adalah proses untuk menilai apa yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara teratur akan memberikan umpan balik, atau feedback, yang akan membantu orang memperbaiki diri secara teratur untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Konsep Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai hasil atau output dari sebuah program sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hubungan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai disebut sebagai efektivitas. Efektivitas sebuah organisasi atau program berbanding lurus dengan output yang dihasilkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Semakin besar output yang berhasil dihasilkan dalam upaya mewujudkan tujuan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas organisasi atau program tersebut. Sebaliknya, jika output yang dihasilkan rendah atau jauh dari target yang ditetapkan, mengindikasikan rendahnya tingkat efektivitas organisasi/program dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, efektivitas

merupakan ukuran sejauh mana keluaran/hasil nyata yang diperoleh sesuai atau mendekati hasil yang ditargetkan dalam perencanaan. Semakin dekat hasil nyata dengan target, berarti semakin efektif upaya yang dilakukan (Rondonuwo, 2015).

Indikator Pengukuran Efektivitas

Berdasarkan pendapat David Krech *et al* yang dikutip oleh (Nugroho, 2018) menyatakan bahwa indikator efektivitas adalah jumlah hasil yang dicapai, jumlah hasil yang dimaksud adalah jumlah yang dihasilkan berupa kuantitas atau bentuk fisik dari program atau kegiatan. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara input dengan output, usaha dengan hasil, dan persentase pencapaian program kerja yang sudah dijalankan. Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa indikator pengukuran efektivitas adalah jumlah hasil yang dicapai, tingkat kepuasan masyarakat, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan tujuan, dan dampak nyata program.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan hasil akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan capaian kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Dalam menyusun LKIP, instansi pemerintah harus dapat menyajikan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif dalam satuan persentase. LKIP menjadi bahan penilaian atas tingkat keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bangkalan, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul apa adanya, tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Sementara itu, pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dalam keadaan alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2023).

Objek penelitian ini yaitu Efektivitas Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi Periode 2018-2022. Sedangkan yang dijadikan sebagai subjek yaitu Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dan Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumentasi, dan studi literatur. Melalui pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan proses pengolahan data untuk menghasilkan hasil penelitian. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan indikator pengukuran efektivitas dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Realisasi Belanja Daerah Pada Kota Bekasi Periode 2018-2022

Dalam penelitian ini penulis mengukur efektivitas atas realisasi belanja daerah Kota Bekasi periode 2018-2022 dengan indikator pengukuran efektivitas menurut Sutrisno yang menyatakan bahwa indikator pengukuran efektivitas terdiri dari keberhasilan program, tingkat kepuasan masyarakat, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, ketetapan tujuan, dan dampak dari program.

1. Keberhasilan Program

Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan beragam program dengan menitikberatkan pada pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan dana. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dan sarana perkotaan. Penyusunan program dilakukan melalui tahapan perencanaan yang menyeluruh, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan program-program tersebut sesuai dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bekasi. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bekasi berhasil melaksanakan program-program sebanyak 637 program dengan jumlah biaya yang digunakan untuk seluruh program sebanyak Rp22.471.463.192.079,30, Dengan capaian kinerja pada periode 2018-2022 yang berfluktuasi mengalami kenaikan pada 2018-2019 dan mengalami penurunan pada 2019 hingga 2022. Penurunan ini disebabkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator kinerja Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai keberhasilan program terdapat kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaannya seperti permasalahan keterlambatan dalam proses pencairan dana, kesulitan teknis di lapangan, permasalahan terkait birokrasi, serta kurangnya sinkronisasi antar unit Perangkat Daerah. Dengan terdapatnya kendala yang muncul, Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah strategis dalam mengatasi kendala-kendala yang perlu dihadapi untuk memastikan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program dan penyesuaian strategi agar memastikan program telah berjalan sesuai dengan rencana dan setiap program yang dijalankan dapat di *monitoring* bagaimana perkembangan pelaksanaan programnya apabila ada kekurangan maka diperbaiki agar program dapat dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Langkah tersebut

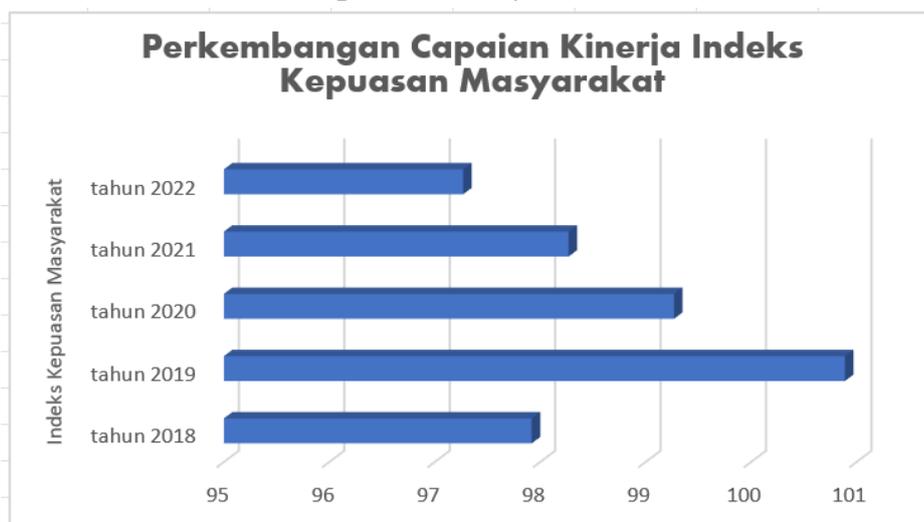
diharapkan dapat mengatasi kendala yang muncul pada pelaksanaan program dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memastikan program yang dijalankan dapat mencapai saran yang telah ditetapkan.

2. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Masyarakat Kota Bekasi dalam mengetahui program yang dijalankan Pemerintah Kota Bekasi cukup tinggi. Dengan adanya masyarakat yang memiliki pengetahuan terhadap program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi memberikan dampak signifikan terhadap program yang dijalankan karena didukungnya partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini berkat upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam berbagai media. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi tidak hanya berfungsi dalam memperkenalkan programnya tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Tingkat kepuasan masyarakat banyak merespon positif terhadap program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi hal ini mencerminkan bahwa program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi. Hal ini didukung dengan data yang diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Periode 2018-2022 yang menggambarkan bahwa indeks kepuasan masyarakat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ini adalah indeks kepuasan masyarakat periode 2018-2022:

Grafik 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Periode 2018-2022



3. Ketepatan Waktu

Dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang sering kali mengalami keterlambatan waktu penyelesaian adalah proyek infrastruktur. Hal ini terjadi karena adanya faktor penyebab yang bervariasi yang menyebabkan infrastruktur mengalami keterlambatan. Dengan adanya keterlambatan ini maka akan berdampak pada capaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi dan terganggunya layanan publik. kendala yang

menyebabkan terjadinya keterlambatan proyek infrastruktur antara lain permasalahan teknis di lokasi, terlambatnya penyaluran anggaran, kondisi cuaca yang tidak mendukung, serta rumitnya prosedur administratif.

Dengan adanya kendala dan dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan waktu penyelesaian proyek infrastruktur, maka Pemerintah Kota Bekasi melakukan langkah-langkah dalam mengatasi keterlambatan proyek infrastruktur dengan meningkatkan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Penerapan sanksi bagi kontraktor yang tidak memenuhi target waktu serta peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah merupakan beberapa langkah yang diambil untuk memastikan program dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Dengan langkah tersebut diharapkan program proyek infrastruktur dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan waktu yang ditentukan.

4. Ketepatan Sasaran

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Bekasi Periode 2018-2022, banyak sekali indikator kerja yang tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan program dalam mencapai sasaran program yaitu masalah pendanaan menjadi kendala utama, hambatan teknis juga muncul dalam proses pelaksanaan program. Untuk mencapai sasaran program diperlukan partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakat menjadi landasan penting untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Alokasi sumber daya yang memadai, baik itu finansial, manusia, maupun teknis, sangat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Upaya meningkatkan efektivitas program-programnya, Pemerintah Kota Bekasi telah mengambil serangkaian langkah strategis. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas perencanaan, memperkuat sistem pengawasan dalam pelaksanaan program, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Kota Bekasi juga memperhatikan pada alokasi sumber daya yang tepat. Dengan strategi ini, diharapkan akan menghasilkan program yang tidak hanya mencapai target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Bekasi.

5. Ketepatan Tujuan

Dalam mengetahui program yang dijalankan Pemerintah Kota Bekasi yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan faktor pendorong ketercapaian tujuan dari program yang dijalankan. Program di bidang pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan pada infrastruktur dan fasilitas pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah baru. Dalam aspek kesehatan, keberhasilan program terlihat dari perbaikan terhadap layanan medis, mencakup pendirian pusat kesehatan masyarakat yang lebih merata distribusinya dan sebagainya. Keberhasilan program-program di bidang pendidikan dan kesehatan ini telah menciptakan efek besar yang positif, menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi kualitas hidup, produktivitas, maupun kesempatan untuk maju dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam memastikan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi mencapai tujuan program yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi terhadap program yang dijalankan dan melaksanakan langkah-langkah strategis program.

Langkah-langkah strategis ini dirancang dan diimplementasikan dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, sekaligus beradaptasi dengan tantangan dan peluang baru dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

6. Dampak Dari Program

Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi telah memberikan dampak positif yang diharapkan seperti Peningkatan kualitas hidup masyarakat, Terdapat perbaikan yang signifikan dalam hal fasilitas umum di seluruh wilayah Kota Bekasi, serta Akses terhadap layanan publik telah mengalami peningkatan. Walaupun masih ada kendala yang harus dihadapi, dampak positif dari program-program pemerintah ini telah membawa Kota Bekasi selangkah lebih dekat pada visinya sebagai kota yang maju, berkelanjutan, dan inklusif. Keberhasilan ini menjadi landasan kuat bagi perencanaan dan implementasi program-program pembangunan di masa mendatang, dengan harapan dapat terus meningkatkan kualitas hidup seluruh warga Kota Bekasi.

Analisis Efektivitas Kelompok Belanja Daerah Pada Kota Bekasi Periode 2018-2022

Analisis efektivitas anggaran belanja Pemerintah Kota Bekasi memiliki manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai tolak ukur tentang apa saja yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi tersebut seperti halnya pelayanan publik, infrastruktur perkotaan, akses fasilitas umum yang mudah sehingga dapat merasakan kenyamanan dan masyarakat merasa tergantu atas program yang dijalankan Pemerintah Kota Bekasi dan akan membantu mewujudkan visi misi yang sudah di rencanakan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut ini:

Tabel 2 Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektif
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No.690.900.327

Berikut adalah perhitungan efektivitas untuk anggaran kelompok belanja daerah Pada Kota Bekasi periode 2018-2022:

Tabel 3 Efektivitas Kelompok Belanja Daerah Kota Bekasi Periode 2018

Tahun 2018				
Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
Belanja	5.745.961.495.721	5.000.442.687.914,14	87,03	Cukup Efektif
Belanja Operasi	4.729.604.533.577	4.219.475.858.337,17	89,21	Cukup Efektif
Belanja Pegawai	2.428.803.623.851	2.245.987.148.767	92,47	Efektif
Belanja Barang dan Jasa	2.127.022.644.840	1.81.530.456.166,17	85,50	Cukup Efektif
Belanja Bunga	8.374.400	8.374.400	100,00	Efektif
Belanja Subsidi	1.500.000.000	394.631.518	26,31	Tidak Efektif
Belanja Hibah	84.795.002.486	68.503.996.486	80,79	Cukup Efektif
Belanja Bantuan Sosial	87.474.888.000	86.051.251.000	98,37	Efektif
Belanja Modal	1.013.356.962.144	780.096.411.797,97	76,98	Kurang Efektif
Belanja Modal Tanah	108.920.565.000,00	93.607.533.400,00	85,94	Cukup Efektif
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.988.664.560,44	160.988.664.560,44	71,57	Kurang Efektif
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226.323.687.419,56	129.864.226.609,35	57,38	Tidak Efektif
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	514.813.274.895,00	439.621.545.416,62	85,39	Cukup Efektif
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.310.770.269	2.310.770.269	77,29	Kurang Efektif
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	29,01	Tidak Efektif
Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	29,01	Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah,2024

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2018, kelompok belanja daerah dari belanja operasi yang tergolong kriteria cukup efektif, komponen belanja operasi yang tergolong kriteria tidak efektif adalah belanja subsidi. Kelompok belanja modal dinilai kurang efektif dan komponen belanja modal yang tergolong kriteria kurang efektif adalah belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset lainnya serta yang tergolong kriteria tidak efektif adalah belanja modal gedung dan bangunan. Pada belanja tidak terduga dinilai tidak efektif.

Tabel 4 Efektivitas Kelompok Belanja Daerah Kota Bekasi Periode 2019

Tahun 2019				
Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
Belanja	7.004.094.885.460,00	5.566.376.729.279,03	79,47	Kurang Efektif
Belanja Operasi	5.348.414.528.411,00	4.461.255.631.781,29	83,41	Cukup Efektif
Belanja Pegawai	1.899.851.740.013,00	1.899.851.740.013,00	81,79	Cukup Efektif
Belanja Barang dan Jasa	2.752.709.787.972,00	2.359.579.036.095,29	85,72	Cukup Efektif
Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	5.543.886.923,00	85,29	Cukup Efektif
Belanja Hibah	161.995.136.800,00	94.504.751.250,00	58,34	Tidak Efektif
Belanja Bantuan Sosial	104.319.860.600,00	101.776.217.500,00	97,56	Cukup Efektif
Belanja Modal	1.362.418.915.611,00	1.104.382.128.417,74	81,06	Cukup Efektif
Belanja Modal Tanah	292.093.168.979,00	269.884.026.860,00	92,40	Efektif
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.585.975.143,00	160.569.770.849,00	78,49	Kurang Efektif
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.788.944.890,00	163.110.208.030,00	70,98	Kurang Efektif
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	634.267.434.039,00	509.263.013.933,74	80,29	Cukup Efektif
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.683.392.560,00	1.555.108.745,00	92,38	Efektif
Belanja Tidak Terduga	293.261.441.438,00	738.969.080,00	0,25	Tidak Efektif

Belanja Tak Terduga	293.261.441.438,00	738.969.080,00	0,25	Tidak Efektif
---------------------	--------------------	----------------	------	---------------

Sumber: Data Diolah,2024

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019, kelompok belanja daerah yaitu belanja operasi dinilai cukup efektif, namun pada komponen belanja operasi yaitu belanja hibah dinilai tidak efektif. Pada belanja modal dinilai cukup efektif, namun pada komponen belanja modal yang dinilai kurang efektif adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Pada belanja tidak terduga dinilai tidak efektif.

Tabel 5 Efektivitas Kelompok Belanja Daerah Kota Bekasi Periode 2020

Tahun 2020				
Belanja	5.757.432.487.561,00	4.785.811.812.190,00	83,12	Cukup Efektif
Belanja Operasi	4.303.595.073.630,00	3.777.484.224.403,00	87,78	Cukup Efektif
Belanja Pegawai	1.981.447.219.292,00	1.798.773.088.684,00	90,78	Efektif
Belanja Barang dan Jasa	2.145.058.658.538,00	1.817.424.662.108,00	84,73	Cukup Efektif
Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	4.441.356.961,00	74,02	Kurang Efektif
Belanja Hibah	67.775.115.800,00	56.294.150.650,00	83,06	Cukup Efektif
Belanja Bantuan Sosial	103.314.080.000,00	100.550.966.000,00	97,33	Efektif
Belanja Modal	1.113.115.198.940,00	790.046.033.137,00	70,98	Kurang Efektif
Belanja Modal Tanah	225.231.313.803,00	123.163.120.173,00	54,68	Tidak Efektif
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	390.134.371.825,00	317.625.168.491,00	81,41	Cukup Efektif
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	246.563.386.751,00	179.875.566.208,00	72,95	Kurang Efektif
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	249.146.142.761,00	168.497.804.303,00	67,63	Kurang Efektif
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.039.983.800,00	884.373.962,00	43,35	Tidak Efektif
Belanja Tidak Terduga	340.722.214.991,00	218.281.554.650,00	64,06	Kurang Efektif
Belanja Tak Terduga	340.722.214.991,00	218.281.554.650,00	64,06	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah,2024

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2020, kelompok belanja daerah yaitu belanja operasi dinilai cukup efektif, namun pada komponen belanja operasi yaitu belanja subsidi dinilai kurang efektif. Pada belanja modal dinilai kurang efektif dan komponen belanja modal yang dinilai kurang efektif adalah Belanja modal gedung dan bangunan dan Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan komponen belanja modal yang dinilai tidak efektif adalah belanja modal tanah dan belanja modal aset tetap lainnya. Pada belanja tidak terduga juga dinilai kurang efektif.

Tabel 6 Efektivitas Kelompok Belanja Daerah Kota Bekasi Periode 2021

Tahun 2021				
Belanja	6.449.614.890.862,00	5.704.885.462.982,00	88,45	Cukup Efektif
Belanja Operasi	4.659.35.443.268,00	4.204.029.599.061,00	90,23	Efektif
Belanja Pegawai	2.072.844.545.064,00	1.956.085.657.274,00	94,37	Efektif
Belanja Barang dan Jasa	2.232.053.528.866,00	1.946.853.293.444,00	87,22	Cukup Efektif
Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	4.884.194.737,00	81,40	Cukup Efektif
Belanja Hibah	215.535.311.288,00	168.451.387.304,00	78,15	Kurang Efektif
Belanja Bantuan Sosial	132.912.058.050,00	127.755.066302,00	96,12	Efektif
Belanja Modal	1.377.851.309.337,00	1.189.300.902.085,00	86,32	Cukup Efektif
Belanja Modal Tanah	306.328.038.165,00	254.142.199.442,00	82,96	Cukup Efektif
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.342.843.250,00	264.661.713.494,00	84,46	Cukup Efektif

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228.906.639.887,00	201.567.926.532,00	88,06	Cukup Efektif
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	526.734.852.025,00	466.664.809.373,00	88,60	Cukup Efektif
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.538.936.010,00	2.264.253.244,00	89,18	Cukup Efektif
Belanja Tidak Terduga	412.418.138.257	311.554.961.836,00	75,54	Kurang Efektif
Belanja Tak Terduga	412.418.138.257	311.554.961.836,00	75,54	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah,2024

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2021, kelompok belanja daerah yaitu belanja operasi dinilai efektif, namun dari komponen belanja operasi yang dinilai kurang efektif yaitu belanja hibah. Pada belanja modal dinilai cukup efektif dan belanja tidak terduga dinilai kurang efektif.

Tabel 7 Efektivitas Kelompok Belanja Daerah Kota Bekasi Periode 2022

Tahun 2022				
Belanja	6.673.930.904.273,00	5.718.816.481.557,00	85,69	Cukup Efektif
Belanja Operasi	5.233.700.416.291,00	4.623.563.102.587,00	88,34	Cukup Efektif
Belanja Pegawai	2.262.360.541.630,00	2.028.519.756.782,00	89,66	Cukup Efektif
Belanja Barang dan Jasa	2.262.360.541.630,00	2.028.519.756.782,00	86,16	Cukup Efektif
Belanja Subsidi	7.000.000.000,00	5.659.942.704,00	80,86	Cukup Efektif
Belanja Hibah	247.970.841.980,00	235.916.581.481,00	95,14	Efektif
Belanja Bantuan Sosial	153.539.640.000,00	145.276.266.000,00	94,62	Efektif
Belanja Modal	1.266.452.179.915,00	1.073.714.002.646,00	84,78	Cukup Efektif
Belanja Modal Tanah	134.093.435.732,00	78.294.563.017,00	58,39	Tidak Efektif
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.489.007.162,00	326.903.754.942,00	86,83	Cukup Efektif
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.071.793.564,00	192.838.870.845,00	87,63	Cukup Efektif
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	532.839.106.102,00	472.984.678.264,00	88,77	Cukup Efektif
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.958.837.355,00	2.692.135.578,00	90,99	Efektif
Belanja Tidak Terduga	173.778.308.067,00	21.539.376.324,00	12,39	Tidak Efektif
Belanja Tak Terduga	173.778.308.067,00	21.539.376.324,00	12,39	Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah,2024

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2022, kelompok belanja daerah yaitu belanja operasi dinilai cukup efektif. Pada belanja modal dinilai cukup efektif, namun pada komponen belanja modal yang dinilai tidak efektif adalah belanja modal tanah. Pada belanja tidak terduga dinilai kurang efektif.

Analisis Faktor Penyebab Ketidakefektifan Belanja Daerah Pada Kota Bekasi Periode 2018-2022

Faktor penyebab ketidakefektifan realisasi belanja daerah Kota Bekasi pada periode 2018-2022 antara lain:

1. Munculnya berbagai kesulitan teknis di lapangan. Ini mencakup mulai dari kendala geografis yang menghambat akses ke daerah-daerah tertentu, ketidaksesuaian antara rencana dengan kondisi riil di lapangan, hingga kekurangan sumber daya teknis atau keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk menjalankan program secara optimal. Kesulitan-kesulitan teknis ini

- seringkali sulit diprediksi pada tahap perencanaan dan memerlukan fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi dari tim pelaksana program.
2. Perencanaan yang kurang matang: Perencanaan yang kurang matang dan tidak berbasis data yang akurat dapat menyebabkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Perencanaan anggaran yang kurang matang yang menyebabkan alokasi dana yang tidak tepat sasaran. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya analisis kebutuhan pada program yang dijalankan atau kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah.
 3. Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit: Proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit seringkali menghambat implementasi program, yang berujung pada penyerapan anggaran yang rendah. Masih terdapat sejumlah prosedur administratif yang cenderung memperlambat proses implementasi program. Ini termasuk proses pengambilan keputusan yang panjang, tumpang tindih kewenangan antar instansi,. Permasalahan birokrasi ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi, tetapi juga berpotensi mengurangi tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.
 4. Kurangnya kapasitas SDM: Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten dan tidak memahami teknis pengelolaan anggaran dapat menyebabkan penggunaan dana yang tidak efektif.
 5. Keterlambatan dalam pelaksanaan program: Keterlambatan dalam pelaksanaan program atau proyek menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal dan berdampak pada efektivitas belanja daerah. Salah satu nya adanya permasalahan keterlambatan dalam proses pencairan dana. Fenomena ini tidak hanya mengganggu alur kerja dan jadwal pelaksanaan program, tetapi juga berpotensi mengakibatkan peningkatan biaya operasional dan penurunan efektivitas program secara keseluruhan. Keterlambatan pencairan dana ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari proses administratif yang berbelit-belit, ketidaksesuaian antara siklus anggaran dengan kebutuhan program, hingga perubahan prioritas anggaran yang mendadak.
 6. Kurangnya koordinasi antar unit Perangkat Daerah, banyak program pemerintah kota bersifat lintas sektoral dan membutuhkan koordinasi yang erat antar berbagai unit perangkat daerah. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi miskomunikasi, tumpang tindih program, atau bahkan konflik kepentingan antar unit yang menghambat implementasi program secara efektif. Kurangnya koordinasi ini tidak hanya mengakibatkan pemborosan sumber daya, tetapi juga dapat mengurangi dampak positif program terhadap masyarakat.

Faktor penyebab yang dihadapi dalam pelaksanaan program meliputi perencanaan yang kurang matang, birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), keterlambatan dalam pelaksanaan program. Kendala ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program dan mempengaruhi capaian target.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis efektivitas realisasi belanja daerah pada Kota Bekasi Periode 2018-2022 menurut Sutrisno menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi periode 2018-2022 mengalami fluktuasi, terjadinya kenaikan pada tahun 2018-2019 dari capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 61,29% menjadi pada 2019 sebesar 75% dan

terjadinya penurunan capaian kinerja pada tahun 2019-2020, pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 75% menjadi pada tahun 2020 sebesar 58,33%, pada tahun 2020-2021 yang capaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2020 sebesar 58,33% menjadi pada tahun 2021 sebesar 57,69% dan pada tahun 2021-2022, capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 57,69% menjadi pada tahun 2022 sebesar 42,41%. Hal tersebut diakibatkan karena Pemerintah Kota Bekasi tidak berhasil dalam mencapai target dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari hasil capaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi, maka realisasi belanja daerah Kota Bekasi Periode 2018-2022 dinilai kurang efektif. Serangkaian evaluasi terhadap program Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa keberhasilan program ditentukan oleh pencapaian tujuan yang telah direncanakan, dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Meskipun terdapat fluktuasi kinerja dan berbagai kendala seperti keterlambatan pencairan dana, masalah birokrasi, dan hambatan teknis, Pemerintah Kota Bekasi terus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Evaluasi yang mendalam terhadap dampak program menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari *output*, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan publik, dan kualitas hidup. Komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi berkala, memperbaiki manajemen proyek, dan menyesuaikan strategi menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis efektivitas kelompok belanja Kota Bekasi periode 2018-2022, pada tahun 2018 yang tergolong kriteria tidak efektif adalah belanja subsidi yang masuk ke dalam kelompok belanja operasi, belanja modal gedung dan bangunan yang masuk ke dalam belanja modal, dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja yang tergolong kriteria kurang efektif adalah belanja modal dengan komponen belanja modal yang kurang efektif adalah belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset tetap lainnya yang masuk ke dalam kelompok belanja modal. Pada tahun 2019, kelompok belanja daerah yang tergolong kriteria tidak efektif adalah belanja hibah yang masuk ke dalam belanja operasi dan belanja tidak terduga serta kelompok belanja daerah yang tergolong kriteria kurang efektif adalah belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan yang masuk ke dalam belanja modal. Pada tahun 2020, kelompok belanja daerah yang tergolong kriteria tidak efektif adalah belanja modal tanah dan belanja modal aset tetap lainnya yang masuk ke dalam belanja modal. Kelompok belanja daerah yang tergolong kriteria kurang efektif adalah belanja subsidi yang masuk ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan dan irigasi, dan jaringan, dan belanja tidak terduga. Pada tahun 2021, kelompok belanja daerah yang tergolong kriteria kurang efektif adalah belanja hibah yang masuk ke dalam belanja operasi dan belanja tidak terduga. Pada tahun 2022, kelompok belanja daerah yang tergolong kriteria tidak efektif adalah belanja modal tanah dan belanja tidak terduga.
3. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis faktor penyebab ketidakefektifan belanja daerah pada periode 2018-2022, faktor penyebab ketidakefektifan belanja daerah meliputi perencanaan yang kurang matang, birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), keterlambatan

dalam pelaksanaan program. Kendala ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan belanja daerah dan mempengaruhi capaian target.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan Dan Kepribadian Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Kelurahan Gedong. *Jurnal Manajemen*, Vol 12, No 1, Hal 129 - 143.
- Bastian, I. (2022). *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. (2023). Retrieved From Www.Dispendukcapilbkl.Com:Http://Dispendukcapil.Bangkalankab.Go.Id/Pages/Lakip
- Fauziah, W. R. (2022). Efektivitas Program Wirausaha Pemuda Dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Manajemen*, Vol 14, No 2, Hal 367-375.
- Fauzihardani, S. W. (2022). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Fiscal Stress Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Rebudgeting Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, Vol 4, No 1, Hal 93 - 110.
- Halawa, O. (2023). Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Akuntansi*, Vol 1, No 2, Hal 375-381.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
<https://bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi>. (n.d.).
<https://bekasikota.go.id/pages/lambang-daerah-kota-bekasi>. (n.d.).
<https://bekasikota.go.id/pages/struktur-organisasi-pemerintah-kota-bekasi>. (n.d.).
<https://dprd.bekasikota.go.id/page/sejarah-kota-bekasi/>. (n.d.).
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Bekasi. (n.d.).
- Kamaludin, A. F. (2022). Pengaruh Perencanaan Penganggaran Dan E - Procurement Terhadap Penyerapan Anggaran. *Jurnal Manajemen*, Vol 7, No 3, Hal 28 - 54.
- Kenap, R. A. (2021). Analisis Trend Efektivitas Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Emba*, Vol 9, No 2, Hal 1088-1095.
- Kumorotomo, W. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UUP STIM YKPN.
- Mamonto, S. I. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, Vol 2, No 1, Hal 1-14.
- Manimbaga, Federicky. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, Vol 9, No 2, Hal 982-992.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho. (2018). Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 2, No 1, Hal 98-107.
- Patarai, M. I. (2018). *Kinerja Keuangan Daerah*. Makasar: De La Macca.

- Pemerintahan Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintahan Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Putri, B. N. (2019). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Akuntansi*, Vol 11, No 2, Hal 276-288.
- Reydonnyzar, M. &. (2019). *Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Rondonuwo, R. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi*, Vol 3, No 4, Hal 23-32.
- Rosalia, Hilda & Maidar. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Sinas Komunikasi, Informasi Dan Persandia Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020. *Jurnal Pendidikan*, Vol 8, No 6, Hal 588-593.
- Rukmini, M. (2022). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah* . Purbalingga: Cv. Eureka Media Aksara.
- Sari, M. Y. (2021). Konsep Value Money Untuk Pengukuran Kinerja Pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang. *Jurnal Iakp*, Vol 2, No 1, Hal 97 - 102.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, R. F. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro 2018 - 2022. *Jurnal Ekonomi*, Vol 7, No 2, Hal 202-206.
- Tuju, Edward. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisien Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang Ekosusbudkum*, Vol 6, No 1, Hal 185-196.
- Weny Putri, D. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang Periode Tahun 2019 - 2022. *Jurnal Sustainability: Riset Akuntansi*, Vol 1, No 2, Hal 126 - 138.
- Wulandari. (2019). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen*, Vol 8, No 2, Hal 5722.
- Yola Oktaliza, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Jurnal Accounting Dan Business*, Vol 1, No 1, Hal 81 - 90.
- Yuwono, S. (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Surabaya: Bayumedia Publishing.